

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

INDRA JAYA SABIR
NPP. 29.1942

Asdaf Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email:
indrajayasabir@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The Covid-19 pandemic demands a lot of changes that require quickly adapting to new habits. The role of Satpol PP in the implementation of AKB in Mamuju Regency is the focus of the problems of this research. **Purpose:** to find out the role of the Satpol PP in the implementation of the IMR during the Covid-19 pandemic in Mamuju Regency and to find an effort program to overcome the existing problems. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation. **Result:** The role of the Satpol PP of Mamuju Regency can be seen from the efforts to control the IMR and control the PPKM that have been carried out in accordance with the program based on the Perbup rules that have been set. The conclusion of the research that the researchers conducted on 13 respondents regarding the role of the Civil Service Police Unit in the Implementation of New Customs Adaptation During the Covid-19 Pandemic in Mamuju Regency so far has been said to be good, it can be measured by indicators of the role of Satpol PP namely Availability of Human Resources, Availability Facilities, Programs, Coordination, Socialization, Supervision, and Enforcement. **Conclusion:** Satpol PP has been good at implementing exemplary integrity in carrying out regulations related to the implementation of health care programs in the AKB era to the community. However, the current obstacle is that there are still many people who do not understand the implementation of the Covid-19 Prokes in the AKB era, this makes the Satpol PP still unable to implement the Perbup on IMR coupled with the lack of Satpol PP personnel in Mamuju Regency. Local governments must always pay attention to good regulations for public health so that the Covid-19 pandemic can soon become an endemic disease, especially in Indonesia.

Keywords: Implementation, Implementation, Health Protocol

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Pandemi Covid-19 menuntut banyak perubahan yang mengharuskan secepatnya beradaptasi dengan kebiasaan baru. Peran Satpol PP dalam pelaksanaan AKB Kabupaten Mamuju menjadi fokus permasalahan dari penelitian ini. **Tujuan** untuk mengetahui Peran Satpol PP dalam pelaksanaan AKB dimasa pandemi Covid-19 di Kabupaten Mamuju dan menemukan program upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:.** Peran dari Satpol PP Kabupaten Mamuju terlihat dari upaya penertiban AKB maupun penertiban PPKM yang dilakukan yang telah sesuai dengan program yang berndaskan aturan Perbup yang sudah di tetapkan. Adapun kesimpulan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 13 orang Responden mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kabiiasaan Baru Pada Masa Pandemic Covid-19 di Kabupaten Mamuju sejauh ini sudah di katakan baik, dapat diukur dengan indikator peran Satpol PP yaitu Ketersediaan SDM, Ketersediaan Fasilitas, Program, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, dan Penindakan. **Kesimpulan** Satpol PP sudah baik dalam melaksanakan integritas yang teladan dalam menjalankan aturan terkait penerapan prokes di era AKB kepada masyarakat. Namun, yang menjadi kendala saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham terkait penerapan Prokes Covid-19 di era AKB, hal ini membuat Satpol PP masih kualahan dalam pelaksanaan Perbup tentang AKB ditambah dengan kurangnya personil Satpol PP di Kabupaten Mamuju. Pemerintah Daerah harus selalu memperhatikan regulasi-regulasi yang baik untuk kesehatan masyarakat agar Pandemic Covid-19 bisa segera menjadi penyakit Endemic khususnya di Indonesia.

Kata kunci: Pelaksanaan, Penerapan, Protokol Kesehatan



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan instansi naungan dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang bertanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat internasional. Infeksi Virus Corona bernama COVID -19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemic dunia oleh WHO, semua negara yang peduli dengan pandemic ini telah merespons dengan cepat dengan menetapkan aturan untuk menjaga negaranya masing-masing. Tinjauan dampak utama dan garis waktu Indonesia melaporkan kasus nol pertama sebelum deklarasi Pandemic Global oleh WHO. Selama periode ini, walaupun banyak laporan terjadinya peningkatan angka infeksi dari seluruh negara di sekitar Indonesia, tetapi Indonesia masih belum memiliki pembatasan perjalanan atau penanganan khusus untuk orang yang masuk dan keluar ke Indonesia, bahkan warga China yang menjadi negara pertama terkena dampak serius. Respon cepat yang dilakukan Pemerintah Indonesia hal ini berpengaruh pada setiap Keputusan Menteri agar segera membuat kebijakan ke masyarakat. Kementerian Kesehatan salah satunya yang merespon cepat dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/202 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan 19 Juni 2020. Pemerintah perlu melakukan upaya sistematis dan komprehensif untuk memulihkan sektor ekonomi. Memberikan hak kepada pemerintah daerah yang dianggap mampu merespons Covid-19 untuk menerapkan kebijakan baru adalah salah satu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. “*new normal*” atau biasa di kenal tatanan normal baru. Sejak pandemic Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai banyak upaya agar selalu menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Dengan banyaknya arahan dan kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat, format dan nama telah berubah beberapa kali, dari PSBB, PSBB peralihan, hingga PPKM darurat hingga PPKM tingkat empat. Upaya pemerintah terus masih dilakukan dalam menahan dan mengurangi penyebaran Covid-19. Setelah PSBB, pada awal Januari 2021 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia akan memasuki era new normal atau kebiasaan baru sehari-hari. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat merespon cepat instruksi langsung dari pemerintah pusat dalam kebijakan adaptasi kebiasaan baru secara menyeluruh di seluruh kabupaten dalam menyambut kebijakan new normal sebagai peluang upaya pemerintah mengendalikan kegiatan masyarakat. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Indris, kembali mengingatkan dalam protokol kesehatan akan diperketat. Serta pembukaan kembali angkutan umum baik udara, laut, dan darat tatap harus mengacu pada parameter protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan penularan virus Covid-19 (SULBAR TERKINI, 2020). Menindaklanjuti surat edaran gubernur tentang adaptasi kebiasaan baru demi penanganan pencegahan Covid-19 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Menyoroti kegiatan pengawasan penyebaran Covid-19, Bupati Mamuju memberikan tugas kepada Kepala Satpol PP beserta perangkat daerah yang terkait untuk melakukan pengawasan beserta unsur Satgas Gotong Royong, Kepolisian maupun TNI. Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju menjelaskan tentang Satpol PP yang merupakan perangkat daerah dibentuk untuk penegakan Perda dan Penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan bencana. Peran Satpol PP sangatlah penting dalam pelaksanaan kedisiplinan akan Protokol Kesehatan Covid-19 di

Kabupaten Mamuju. Satpol beserta Satgas Covid-19, Organisasi Masyarakat, Kepolisian serta TNI takhenti-hentinya selalu mengingatkan masyarakat penerapan protokol kesehatan serta akan pentingnya kesehatan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pandemi Covid-19 menuntut banyak perubahan yang mengharuskan secepatnya beradaptasi dengan kebiasaan baru. Peran Satpol PP dalam pelaksanaan AKB Kabupaten Mamuju menjadi fokus permasalahan dari penelitian ini.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Muhammad Irijik Ibnu Hakim dan Drs. Kahar Haerah, M.si (2021) yang berjudul “Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember.” Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun Hasil penelitian ini Pentingnya peran semua pihak dalam mensosialisasikan penerapan disiplin Protokol Kesehatan Virus Covid-19 agar masyarakat patuh dan disiplin untuk taat.. Hasilnya masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan atas bahanya virus ini. Kedua, Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, dan Gita Sherly. (2021). berjudul “Peran Satpol PP Dalam Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19” Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan 1). Memberikan berbagai macam pelayanan kesehatan yang lebih baik, 2). Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan masalah Covid-19, perlu adanya koordinasi dan juga kerja sama dalam penetapan keadaan darurat pandemi Covid-19 dari kantor wilayah yang berbeda. Ketiga, Ridwan Saragih, Rahmat. (2020)., Berjudul berjudul “Pelaksanaan Tugas Satpol PP Terhadap Dampak COVID-19 Di Kota Tanjungbalai” Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yakni Dalam melaksanakan penanggulangan atas bahayanya virus Covid-19 saat ini melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia, maka dilaksanakan dengan berbagai bentuk dan cara salah satunya memberikan berbagai macam-macam pelayanan kesehatan yang masyarakat efektif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokasi Penulis.

1.5 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis diadakannya penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada Satpol PP dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

II. METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono (2010:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain". Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data. Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, "setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen". Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Covid-19 di Kabupaten Mamuju

A. Hak

1. Ketersediaan Anggaran

Anggaran operasional dalam semua kegiatan tentu berdampak besar dalam terlaksananya sebuah kegiatan. Dengan anggaran yang memadai khususnya untuk operasional kegiatan, maka kegiatan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan harapan. Kasat PolPP Kabupaten Mamuju menjelaskan bahwa dana untuk melaksanakan kegiatan lapangan yang berguna untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 adalah berasal dari hasil *refocusing* anggaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mamuju. Dana yang dikeluarkan ketika dilaksanakannya operasi yustisi saja, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kabupaten Mamuju. Ditugaskan sebanyak 30 orang, gabungan antara aparat Satpol PP, TNI dan Polri. Artinya ketersediaan anggaran yang ada pada setiap pelaksanaan penertiban Adaptasi Kebiasaan Baru di akhir tahun 2021 hingga awal 2022 sangatlah minim di karenakan adanya *refocusing* anggaran daerah. Kepala Satpol PP mengatakan bahwa dengan kurangnya anggaran yang ada tidak menyurutkan semangat anggota Satpol PP Kabupaten Mamuju untuk selalu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Satpol PP. Artinya Satpol PP Kabupaten Mamuju tetap melaksanakan tugasnya dengan baik dan semangat.

2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terlaksananya sebuah kegiatan. Sesuai dengan data ada 77 jabatan yang ada di Dinas Satpol PP Kabupaten Mamuju akan tetapi ada 33 jabatan seksi serta 4 jabatan Kasih yang saat ini belum terisi. Artinya dari segi kuantitas dengan jumlah 37 jabatan yang ada masih sangat kurang. Akan tetapi dengan banyaknya jabatan yang kosong personil anggota Satpol PP yang kurang tidak menjadi kendala pada peran Satpol PP dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada masa pandemic Covid-19 di Kabupaten Mamuju.

3. Ketersediaan Fasilitas

Kantor sebagai sebuah organisasi, memiliki kelengkapan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi kantor khususnya kelengkapan yang dapat membantu aparat kantor dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kelengkapan tersebut meliputi kantor satpol pp dan fasilitas perkantoran yang menunjang kinerja satpol pp. Pada melaksanakan suatu kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Mamuju perlunya sarana dan prasarana bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja karena peralatan merupakan salah satu penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas. Hasil data diatas dapat disimpulkan karena sarana peralatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang dan perlu pengadaan untuk para anggota Satpol PP Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing dalam menertibkan peraturan daerah yang ada.

B. Kewajiban

1. Program

Sebuah Organisasi membutuhkan program dalam membantu kegiatan terlaksana dengan jelas dan terarah. Suatu program disusun dan akan dijalankan oleh organisasi dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju telah melakukan kegiatan pengendalian covid-19 sejak ditemukannya pertama kali kasus covid-19 muncul di Sulawesi Barat, yakni pada 26 maret 2020. Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju telah melaksanakan program dalam proses pengendalian covid-19 di Kabupaten Mamuju sejak maret 2020 sampai dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru yang diberlakukan mulai bulan september 2020.

2. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu usaha atau kerjasama yang dilakukan antara badan, instansi, atau unit dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan kegiatan memutus mata rantai covid-19 dengan menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Mamuju membangun koordinasi dengan beberapa pihak. Pihak yang berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Mamuju diantaranya adalah TNI, POLRI, serta relawan Satgas Covid-19. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 18 Tahun 2020 berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Dinas Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia serta Polisi Republik Indonesia.

3. Sosialisasi

Sebelum masuk ke tahap penegakan, tentu perlu adanya tahap sosialisasi kepada masyarakat. Tahap sosialisasi diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang tahu dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh DPRD. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju mengenai Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Mamuju dilaksanakan di beberapa tempat yang dirasa penting dan perlu untuk disosialisasikan. Kawasan pasar juga tidak luput dari perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju. Satpol PP Kabupaten Mamuju turun langsung ke kawasan pasar untuk menghimbau dan mempraktekkan tata cara transaksi jual beli dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak dan tetap menggunakan masker setiap saat.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang berhubungan erat dengan usaha untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi, oleh karna itu pengawasan dalam sebuah organisasi harus terlaksana sebagaimana mestinya. Wawancara tersebut memberikan informasi kepada peneliti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju disamping melakukan penegakan peraturan daerah, juga didukung dengan kegiatan pengawasan. Hasil dari wawancara peneliti dengan pemuda di salah satu Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Mamuju, Saudara Burhanuddin mengatakan bahwa satuan polisi pamong praja biasanya memang melakukan patroli, ketika malam hari pun Burhanuddin beberapa kali melihat Satpol PP Kabupaten Mamuju berkeliling sekitaran tempat wisata maupun di café-cafe yang ada di Kabupaten Mamuju.

5. Penindakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa arti dari kata penindakan adalah proses, cara, perbuatan menindak. Kegiatan penindakan ini dilaksanakan ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat dan disepakati. Penindakan perlu dilaksanakan dengan bijaksana agar aturan yang ada dapat terus berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju melaksanakan kegiatan penindakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru sejak Agustus 2020 sampai dengan Desember 2021. Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mengatakan bahwa aparat Satpol PP Kabupaten Mamuju melaksanakan kegiatan penegakan hukum Perbub nomor 18 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengatakan bahwa pelanggaran banyak terjadi di kawasan pasar dan tempat wisata, sedangkan untuk kawasan pendidikan seperti sekolah tidak begitu mencolok pelanggaran yang dilakukan, masih dapat diantisipasi dengan teguran lisan saja.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Muhammad Irijik Ibnu Hakim dan Drs. Kahar Haerah, M.si (2021) yang berjudul “Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan *Covid-19* Pada Masyarakat Kabupaten Jember.” Adapun temuan Hasil penelitian ini Pentingnya peran semua pihak dalam mensosialisasikan penerapan disiplin Protokol Kesehatan Virus Covid-19 agar masyarakat patuh dan disiplin untuk taat.. Hasilnya masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan atas bahaya virus ini.

Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, dan Gita Sherly. (2021). berjudul “Peran Satpol PP Dalam Penegakan Protokol Kesehatan *COVID-19*” Adapun temuan hasil penelitian ini menunjukkan Memberikan berbagai macam pelayanan kesehatan yang lebih baik; Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan masalah *Covid-19*, perlu adanya koordinasi dan juga kerja sama dalam penetapan keadaan darurat pandemi *Covid-19* dari kantor wilayah yang berbeda.

Ridwan Saragih, Rahmat. (2020)., Berjudul berjudul “Pelaksanaan Tugas Satpol PP Terhadap Dampak *COVID-19* Di Kota Tanjungbalai” Adapun temuan hasil penelitian ini yakni Dalam melaksanakan penanggulangan atas bahayanya virus *Covid-19* saat ini melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia, maka dilaksanakan dengan berbagai bentuk dan cara salah satunya memberikan berbagai macam-macam pelayanan kesehatan yang masyarakat efektif Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Satpol PP sudah baik dalam melaksanakan integritas yang teladan dalam menjalankan aturan terkait penerapan prokes di era AKB kepada masyarakat. Namun, yang menjadi kendala saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham terkait penerapan Prokes Covid-19 di era AKB, hal ini membuat Satpol PP masih kualahan dalam pelaksanaan Perbup tentang AKB ditambah dengan kurangnya personil Satpol PP di Kabupaten Mamuju. Pemerintah Daerah harus selalu memperhatikan regulasi-regulasi yang baik untuk kesehatan masyarakat agar Pandemic Covid-19 bisa segera menjadi penyakit Endemic khususnya di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis sebagaimana telah diijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Peran dari Satpol PP Kabupaten Mamuju terlihat dari upaya penertiban AKB maupun penertiban PPKM yang dilakukan yang telah sesuai dengan program yang berndaskan aturan Perbup yang sudah di tetapkan. Ketersediaan anggaran yang digunakan dalam operasional AKB ini berasal dari *refocusing* anggaran dinas ataupun OPD lainnya. Dalam ketersediaan anggran ini masih sangat minim dan boleh dikata sangat kurang melihat banyaknya keperluan dalam oprasional pelaksanaan penerapan AKB; Ketersediaan SDM dinas Satpol PP Kabupaten Mamuju masih menjadi kekurangan, baik ASN maupun non ASN serta Tenaga Harian Lepas (THL) masih banyaknya jabatan yang tidak terisi di structural Dinas Satpol PP. Artinya walaupun masih kekurangan dalam ketersediaan SDM Satpol PP masih dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik; Ketersediaan fasilitas oprasional untuk membantuk pelaksanaan penertiban ABK perlunya sarana dan prasarana bagi seluruh anggota Satpol PP dalam bertugas agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Satpol PP Kabupaten Mamuju masih kurang dan perlu adanya pengadaan dan pembaruan fasilitas oprasional untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing dalam menertibkan peraturan daerah. Dalam pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Mamuju terdapat faktor pendukung dan factor penghambat. Adapun faktor pendukung Satpol PP Kabupaten Mamuju dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada masyarakat yaitu (1) Konsistensi penegakan aturan dan penertiban pada masyarakat, (2) Konsistensi penyampaian pelaporan penanganan penertiban dan penegakan hukum baik secara aplikasi maupun manual (3) Dukungan dari pimpinan terkait regulasi dan anggaran serta Standar Operasional Prosedur yang jelas dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan Adaptasi Kabiasaan Baru di Kabupaten Mamuju, yaitu Kondisi masyarakat yang tempramen sehingga tidak mau mendengarkan arahan dari aparat Satpol PP dan juga kurangnya anggran untuk diberikan sebagai transportasi dan uang makan untuk anggota. Satuan Polisi Pamong Praja menjadi kesulitan tersendiri yang harus dihadapi oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju. Sedangkan Upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Mamuju untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Adaptasi Kabiasaan Baru pada masyarakat Kabupaten Mamuju yaitu Satpol PP harus mengedepankan humanis, simpatik pada saat melakukan penertiban dan mengontrol belanja Dinas Satpol PP, mengoptimalkan idle cash, dan meminimalisasi biaya pengeluaran yang harus dibayar oleh suatu Kepala Subagian Keuangan atas penggunaan uang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Soekanto saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi serta jajarannya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sugioyo, P. D. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Alfabeta.
- Muhammad Irijik, I. H. M. S., & Haerah, D. K. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember*. 3(47), 1–16.
- Saragih, R., & Rahmat. (2020). *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai* Ridwan. 2(1), 29.
- Utoyo, M., Absi, W. Z., & Sherly, G. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19*. 27, 98–109.

